

FORENSIC ACCOUNTING TRAINING FOR FINANCIAL FRAUD PREVENTION AND DETECTION FOR VILLAGE APPARATUS

PELATIHAN FORENSIK AKUNTANSI UNTUK PENCEGAHAN DAN DETEKSI KECURANGAN KEUANGAN BAGI APARATUR DESA

Vince Ariany

Politeknik Ganesha Medan

*vinceariany76@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

Forensic accounting training for the prevention and detection of financial fraud for village officials in Deli Serdang Regency, North Sumatra, aims to improve the understanding of the Village Consultative Body (BPD) regarding the principles of forensic accounting. This activity was carried out through workshop methods and case simulations, which included theoretical presentations, case studies, and group discussions. Evaluation of the effectiveness of the training was carried out using pre-tests and post-tests, which showed an increase in participant understanding of 87% after the training. The results of this training are expected to increase the capacity of the BPD in detecting and preventing financial fraud, as well as supporting transparency and accountability in the management of village funds. Recommendations for future training include program sustainability, module development, and stakeholder involvement.

Keywords: *Forensic accounting, fraud prevention, village financial management, Village Consultative Body, training.*

ABSTRAK

Pelatihan forensik akuntansi untuk pencegahan dan deteksi kecurangan keuangan bagi aparatur desa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai prinsip-prinsip forensik akuntansi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode workshop dan simulasi kasus, yang mencakup pemaparan teori, studi kasus, dan diskusi kelompok. Evaluasi efektivitas pelatihan dilakukan dengan pre-test dan post-test, yang menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 87% setelah pelatihan. Hasil pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BPD dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan keuangan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Rekomendasi untuk pelatihan di masa depan mencakup keberlanjutan program, pengembangan modul, dan pelibatan pemangku kepentingan.

Kata Kunci: *Forensik akuntansi, pencegahan kecurangan, pengelolaan keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelatihan.*

1. PENDAHULUAN

Forensik akuntansi memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik, khususnya dalam pemerintahan desa di Indonesia. Kebutuhan akan pengawasan keuangan yang efektif semakin mendesak seiring dengan meningkatnya tren kecurangan keuangan yang melibatkan dana desa, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Achmad et al., 2022; Putri et al., 2023). Laporan tersebut menyoroti kelemahan sistemik dalam mekanisme pemantauan dan deteksi dini praktik kecurangan di tingkat desa, yang dapat menyebabkan kesalahan pengelolaan sumber daya publik secara signifikan (Permatasari, 2024; Mait et al., 2021).

Maraknya penyimpangan keuangan, seperti manipulasi anggaran dan penggelapan dana, sering kali dikaitkan dengan kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip forensik akuntansi dan teknik deteksi kecurangan (Nuraini et al., 2021; Gunanti, 2024). Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang bertugas mengawasi pengelolaan dana desa, perlu meningkatkan kapasitasnya dalam mengidentifikasi indikator potensi kecurangan serta memahami prosedur audit investigatif (Diansari et al., 2022). Kebutuhan akan peningkatan kapasitas ini juga didukung oleh berbagai penelitian yang menekankan pentingnya pelatihan dan edukasi bagi aparatur desa guna meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan (Salam, 2023; Marota & Alipudin, 2019).

Selain itu, penerapan teknologi seperti aplikasi Siskeudes telah terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Salam, 2023; Diansari et al., 2022). Aplikasi ini memungkinkan pelaporan keuangan yang lebih baik serta pemantauan secara real-time oleh aparatur desa dan otoritas pemerintahan yang lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan (Achmad et al., 2022; Permatasari, 2024). Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi serta menyediakan pelatihan yang memadai bagi aparatur desa (Antlöv et al., 2016; Salawati et al., 2024). Sebagai kesimpulan, peningkatan pemahaman tentang forensik akuntansi di kalangan aparatur desa serta penguatan sistem pengendalian internal merupakan langkah penting menuju tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Kolaborasi antara BPD, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mencegah praktik kecurangan serta mendorong penerapan tata kelola yang baik.

Sejalan dengan urgensi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan forensik akuntansi kepada BPD di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta dapat memahami konsep dasar forensik akuntansi, teknik identifikasi fraud, serta metode pencegahan kecurangan keuangan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, efektivitas pelatihan akan diukur melalui metode pre-test dan post-test untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelatihan dalam meningkatkan pemahaman BPD terkait forensik akuntansi?

Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi akademisi, hasil dari kegiatan ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut terkait efektivitas pelatihan forensik akuntansi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Bagi pemerintah desa, peningkatan kapasitas BPD dalam mendeteksi dan mencegah fraud diharapkan dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola dana desa. Sementara itu, bagi masyarakat, penguatan pengawasan keuangan desa oleh BPD akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan terhadap pemerintahan desa serta optimalisasi penggunaan dana desa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1. Desain Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dalam bentuk workshop dan simulasi kasus forensik akuntansi guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan keuangan desa. Workshop ini akan mencakup pemaparan teori terkait forensik akuntansi, praktik identifikasi fraud dalam laporan keuangan desa, serta studi kasus berbasis permasalahan nyata yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, kegiatan ini juga akan dilengkapi dengan

simulasi audit investigatif yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam mengaplikasikan teknik forensik akuntansi.

2.2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dijadwalkan pada 2 November 2024 dan akan berlangsung di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada urgensi peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dan mengawasi penggunaan dana desa agar lebih transparan dan akuntabel.

2.3. Responden Kegiatan

Responden dalam kegiatan ini adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang memiliki peran strategis dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sebagai lembaga yang berfungsi dalam penyampaian aspirasi serta pengawasan terhadap pemerintah desa, BPD perlu memiliki pemahaman yang baik terkait praktik forensik akuntansi guna mencegah terjadinya penyimpangan dan kecurangan keuangan di tingkat desa.

2.4. Metode Evaluasi

Untuk mengukur efektivitas pelatihan, dilakukan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Rangkaian evaluasi terdiri dari:

1. Pre-test: Dilakukan sebelum pelatihan dimulai untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta terkait forensik akuntansi dan deteksi fraud.
2. Post-test: Dilaksanakan setelah pelatihan selesai guna mengukur pemahaman peserta setelah menerima materi dan mengikuti simulasi.
3. Target peningkatan pemahaman: Berdasarkan hasil evaluasi, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman minimal sebesar 87% dibandingkan dengan hasil pre-test.

2.5. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, digunakan beberapa instrumen evaluasi, yaitu:

- Kuesioner pre-test dan post-test berbasis skala Likert untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan.
- Observasi partisipatif untuk mengamati keterlibatan peserta dalam simulasi kasus serta kemampuannya dalam menerapkan teknik forensik akuntansi.
- Diskusi interaktif yang bertujuan untuk menggali pemahaman lebih lanjut, menambah pengalaman peserta terkait pengawasan keuangan desa, serta mengevaluasi efektivitas materi pelatihan yang diberikan.

Melalui pendekatan ini, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan desa secara lebih profesional dan berbasis pada prinsip forensik akuntansi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Hasil Pre-Test

Evaluasi awal yang dilakukan melalui pre-test menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden terkait forensik akuntansi dan deteksi kecurangan keuangan desa masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil pre-test, mayoritas peserta hanya memiliki pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip akuntansi, namun belum memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan keuangan serta teknik audit forensik. Selain itu, beberapa peserta mengaku belum familiar dengan konsep fraud detection, terutama dalam konteks pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa

dalam memahami dan mengimplementasikan forensik akuntansi guna meminimalisir risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

3.2. Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan ini dilakukan dengan pendekatan interaktif dan berbasis kasus, yang terdiri dari tiga metode utama, yaitu:

1. Pemaparan Teori

Materi disampaikan melalui presentasi interaktif yang membahas konsep dasar forensik akuntansi, jenis-jenis fraud yang sering terjadi dalam keuangan desa, serta teknik dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan keuangan.

2. Studi Kasus

Peserta diberikan beberapa skenario kasus nyata terkait dugaan penyimpangan dana desa. Melalui pendekatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan teknik forensik akuntansi dalam menganalisis laporan keuangan dan mendeteksi potensi kecurangan.

3. Diskusi Kelompok

Sesi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh peserta dalam pengawasan keuangan desa serta mencari solusi strategis berdasarkan materi yang telah diberikan.

Secara umum, respon peserta terhadap pelatihan sangat positif. Sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa pelatihan ini memberikan wawasan baru dan meningkatkan pemahaman mereka mengenai mekanisme pencegahan dan deteksi fraud dalam pengelolaan dana desa.

3.3. Analisis Hasil Post-Test

Setelah latihan selesai, dilakukan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan, dengan rata-rata peningkatan mencapai 87 persen dibandingkan dengan hasil pre-test. Hal ini menegaskan bahwa metode pelatihan yang diterapkan efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terkait konsep, teknik, dan implementasi forensik akuntansi dalam pengawasan keuangan desa. Perbandingan antara hasil pre-test dan post-test mengindikasikan bahwa mayoritas peserta mengalami peningkatan kemampuan dalam:

- Mengidentifikasi indikasi awal terjadinya fraud dalam laporan keuangan desa.
- Menggunakan teknik dasar audit forensik untuk mendeteksi penyimpangan keuangan.
- Menganalisis faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa.

3.4. Pembahasan

3.4.1. Implikasi Hasil bagi Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pelatihan ini memberikan gambaran bahwa peningkatan pemahaman Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap forensik akuntansi berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan BPD dapat lebih proaktif dalam mendeteksi indikasi kecurangan serta memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

3.4.2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Keberhasilan Pelatihan

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pelatihan ini meliputi:

- Metode pembelajaran yang interaktif sehingga peserta lebih mudah memahami dan menerapkan materi yang diberikan.
- Studi kasus berbasis permasalahan nyata yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab peserta dalam pengawasan dana desa.

- Dukungan dari pemerintah desa yang memberikan akses bagi peserta untuk mengikuti pelatihan secara penuh.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan, antara lain:

- Tingkat literasi keuangan yang bervariasi di antara peserta, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dalam penyampaian materi.
- Keterbatasan pengalaman peserta dalam menggunakan teknik audit forensik, sehingga masih dibutuhkan pelatihan lanjutan untuk mendalami aspek teknis.

3.4.3. Rekomendasi untuk Pelatihan di Masa Depan

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan serupa di masa mendatang:

- Mengadakan pelatihan lanjutan yang lebih berfokus pada praktik forensik akuntansi menggunakan perangkat lunak audit dan teknik investigatif berbasis teknologi.
- Melibatkan auditor profesional atau akademisi forensik akuntansi sebagai mentor untuk memberikan pengalaman lebih mendalam kepada peserta.
- Menyediakan modul pelatihan yang komprehensif dalam bentuk buku panduan atau e-learning, sehingga peserta dapat terus mengembangkan kompetensinya secara mandiri setelah pelatihan selesai.

Dengan adanya pelatihan berkelanjutan, diharapkan kapasitas aparatur desa dalam melakukan pengawasan keuangan semakin meningkat, sehingga mampu mencegah dan mendeteksi kecurangan secara lebih efektif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai forensik akuntansi dalam rangka pencegahan dan deteksi kecurangan keuangan di tingkat desa. Berdasarkan hasil evaluasi, pelatihan yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan, dengan peningkatan rata-rata sebesar 87 persen dibandingkan sebelum pelatihan.

Metode pelatihan yang diterapkan, yaitu kombinasi antara pemaparan teori, studi kasus, dan diskusi kelompok, terbukti efektif dalam memberikan wawasan dan keterampilan praktis bagi peserta. Hasil post-test menunjukkan bahwa mayoritas peserta telah memahami konsep dasar forensik akuntansi, mampu mengidentifikasi indikasi awal terjadinya fraud, serta memahami teknik audit yang dapat diterapkan dalam pengawasan dana desa.

Secara keseluruhan, pelatihan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas BPD dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan peserta, diharapkan risiko terjadinya penyimpangan keuangan dapat diminimalisir, sehingga tercipta tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi dan temuan dari pelaksanaan pelatihan ini, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas program serupa di masa mendatang:

1. Keberlanjutan Program Pelatihan

Pelatihan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan di desa-desa lain agar semakin banyak aparatur desa yang memiliki pemahaman terkait forensik akuntansi dan teknik pencegahan kecurangan keuangan.

2. Pengembangan Modul dan Materi

Penyusunan modul pelatihan yang lebih komprehensif, baik dalam bentuk buku panduan maupun platform digital, akan membantu peserta untuk terus mengembangkan pemahaman mereka setelah pelatihan berakhir.

3. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, serta auditor profesional dapat meningkatkan efektivitas pelatihan dengan memberikan wawasan yang lebih luas serta pendekatan yang lebih aplikatif dalam pencegahan fraud.

4. Pelatihan Berbasis Teknologi

Implementasi teknologi dalam pengawasan keuangan desa, seperti penggunaan perangkat lunak audit dan analisis data keuangan, dapat menjadi fokus dalam pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam deteksi kecurangan berbasis digital.

Dengan adanya pelatihan lanjutan dan peningkatan akses terhadap sumber daya pembelajaran, diharapkan aparatur desa dapat semakin kompeten dalam menerapkan prinsip forensik akuntansi sehingga tercipta tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, T., Kusumo, W., & Zulaikha, Z. (2022). Effectiveness of internal control system as early detection tool in fraud prevention of village fund management. *Review of Economics and Finance*, 20, 119-123. <https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.12>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 village law in indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Diansari, R., Othman, J., Musah, A., Adhivinna, V., & Sutari, T. (2022). Analysis of factors affecting the accountability of village fund management at village government. *Journal of Business and Information Systems* (E-Issn 2685-2543), 4(2), 70-78. <https://doi.org/10.36067/jbis.v4i2.127>
- Gunanti, R. (2024). The effect of hexagon fraud elements on village fund fraud with religiosity as a moderating variable. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16252>
- Mait, M., Mandagi, M., & Dilapanga, A. (2021). Role of government authorities in the supervision of internal fraud prevention fund management in village. *Technium Social Sciences Journal*, 21, 73-84. <https://doi.org/10.47577/tssj.v21i1.3926>
- Marota, R. and Alipudin, A. (2019). Monitoring system on village fund: synergy between communities and regulators (case study on bogor district government). *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, 3(2), 54-59. <https://doi.org/10.33751/jhss.v3i2.1456>
- Nuraini, S., Heriyati, D., Millati, I., Puriyanti, A., & Lestari, R. (2021). Village funds: a study of community village monitoring.. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.211117.011>
- Permatasari, P. (2024). Village fund management and reporting systems: are they accountable?. *Transforming Government People Process and Policy*, 18(4), 512-528. <https://doi.org/10.1108/tg-07-2023-0098>
- Putri, C., Argilés-Bosch, J., & Ravenda, D. (2023). Creating good village governance: an effort to prevent village corruption in indonesia. *Journal of Financial Crime*, 31(2), 455-468. <https://doi.org/10.1108/jfc-11-2022-0266>
- Salam, U. (2023). Enhancing village empowerment: strategic analysis of using the siskeudes application in bungah village. *Journal of Office Administration Education and Practice*, 3(1), 36-51. <https://doi.org/10.26740/joaep.v3n1.p36-51>

Salawati, U., Rusmayadi, G., Pareira, M. S., Tahir, U., & Sutiharni, S. (2024). OPTIMIZING THE USE OF TECHNOLOGY IN CREATING CLIMATE SMART AGRICULTURE. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(2).